

Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

Nyai Fitriyani¹ Raden Imam Al Hafis²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
nyaifitriyani@student.uir.ac.id radenimamalhafis@soc.uir.ac.id

Received : August 13, 2024;

Accepted : 15 August 2024

Abstract

This research aims to find out how the implementation of preventing and eradicating drug trafficking in Pekanbaru City by the National Narcotics Agency of Pekanbaru City and to find out the obstacles to implementing preventing and eradicating drug trafficking in Pekanbaru City by the National Narcotics Agency of Pekanbaru City. By using a descriptive research approach with qualitative methods. Data collection techniques used in research are interviews, observation and documentation. The data analysis process in this research was carried out through four stages, namely Data Collection, Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. From the results of research conducted regarding the Implementation of Prevention and Eradication of Drug Trafficking in Pekanbaru City by the Pekanbaru City National Narcotics Agency, it is known that if the Implementation of Prevention and Eradication of Drug Trafficking has not been implemented well, this is because resources are still limited in the Implementation of Prevention and Eradication, and there are shortages. facilities and infrastructure to support prevention and eradication activities so that it becomes an obstacle to implementation in the field, as well as operational standards and responsibilities that are not yet maximized due to efforts to carry out the duties and functions of an employee's job which is concurrently for several tasks or jobs.

Key Words : *Implementation, Prevention, Narcotics, National Narcotics Agency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data Dan Penarikan Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terkait Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru diketahui bahwa jika Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan sumber daya masih terbatas dalam Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan, dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pencegahan dan pemberantasan sehingga menjadi hambatan pelaksanaan di lapangan, serta belum maksimalnya Standar Operasional dan tanggung jawab dikarenakan upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu pekerjaan pegawai yang merangkap untuk beberapa tugas atau pekerjaan.

Kata Kunci : *Implementasi, Pencegahan, Narkoba, Badan Narkotika Nasional.*

Pendahuluan

Kerentanan Indonesia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dipengaruhi oleh kondisi geografis, geopolitik, sosial ekonomi, arus informasi dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi dan perubahan gaya hidup. Secara Geografis sebagai Negara kepulauan terbesar didunia Indonesia mempunyai garis pantai sekitar 85.000 Km, perbatasan lau yang terbuka inilah yang membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba. Secara geografis, letak Negara kita ini juga dekat dengan daerah penanaman dan produksi opium yaitu wilayah segitiga emas dan bulan sabit emas. Usaha keras untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Negara tetangga terutama Thailand, Malaysia dan Singapura akhirnya mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional.

Secara Geostrategis Kepulauan Indonesia adalah jembatan lalulintas angkutan manusia dan barang antara Asia dan Australia. Indonesia juga berada dijalur lalulintas Samudera Hindia dan Pasifik yang ramai dilewati armada perdagangan internasional. Hal ini juga yang membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba oleh sindikat narkoba internasional. Secara Demografis Karena penduduknya terbesar keempat didunia jadilah Indonesia pasar potensial buat pemasaran gelap narkoba. Secara Sosial, Ekonomi dan Poliik Bangsa Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis multi dimensi (diantaranya social, ekonomi, dan politik). Disamping itu bisnis narkoba memberikan keuntungan yang menjanjikan. Situasi seperti ini membuat posisi Indonesia rawan penyalahgunaan narkoba. Modernisasi dan Penyebaran Gaya Hidup Modern Gaya hidup konsumtif, hedonis, kemajuan komunikasi, informasi dan globalisasi mendorong orang untuk meniru gaya hidup modern, diantaranya menikmati hidup singkat ini sepuas puasnya dengan mengkonsumsi narkoba. Disamping itu adanya trend bahwa remaja tidak gaul kalau tidak menggunakan narkoba.

Fenomena sosial budaya global Yang bercirikan konsumsi berlebihan, hedonism, emulsi (perlombaan). Simbol status, penghancuran sosiokultural, budaya selalu terkalahkan menyebabkan penyalahgunaan narkoba menjadi tempat pelarian. Fenomena sosial kultural lainnya Seperti diantaranya gejala myopia social, yang berpandangan dekat, tidak lagi memikirkan masa depan, inginnya segala sesuatu terwujud secara instan atau gejala hilangnya kesadaran hukum. Situasi yang penuh ketegangan Terutama di daerah perkotaan, tekanan pekerjaan tingginya biaya hidup dan berbagai tekanan lain kadang membuat orang menjadi tegang dan larinya ke narkoba.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat (BKNN). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, kedudukan BKNN selanjutnya diganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional disingkat (BNN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dibentuklah Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang masing-masing (BNP dan BNK) sebelumnya tidak mempunyai hubungan struktural secara vertikal dengan BNN.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN berubah fungsi menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan

dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta mempunyai perwakilan didaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal (BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota) yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah.

Pelantikan kepala BNN Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/170/IX/2011/BNN tanggal 30 September 2011 Tentang Pengangkatan Kepala BNN Kota Pekanbaru AKBP 37 SUKITO, SH. BNN Kota Pekanbaru oleh Kepala BNN Republik Indonesia di Jakarta pada Tanggal 06 Oktober 2011, menjadi awal sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol serta memonitor dan mengendalikan pelaksanaan P4GN di wilayah kota Pekanbaru. Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat pusat, provinsi, hingga kota dan kabupaten. Tujuannya agar penanggulangan narkoba di Indonesia lebih maksimal dan optimal.

Menurut Edwards III Implementasi kebijakan merupakan tahapan pengambilan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan konsekuensi kebijakan tersebut bagi orang-orang yang terkena dampaknya (dalam H. Tachjan, 2006 : 25).

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Siagian (Melawat, 2022) adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Nawawi (2009;27) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai peroses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Gulick (2011;4) Administrasi adalah suatu sistem pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara tertentu bekerja sama untuk tunuan bersama. Beddy Irawan (2017:25) mengatakan di Indonesia administrasi merupakan kegiatan dengan bantuan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum sering didefinisikan dalam artian sempit. Oleh karena itu dijelaskan juga administrasi dalam arti "sempit" maupun "luas" sebagai berikut :

Administrasi dalam arti sempit adalah administrasi khususnya di Indonesia sering dimaknai dengan kegiatan "*tulis menulis*" "*catat mencatat*" "*mengetik*" "*surat menyurat*", yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju, sedangkan Administrasi dalam arti luas Sebagai proses kerjasama saat

penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan definisi beberapa para ahli yang telah dijabarkan diatas, Administrasi adalah seluruh proses kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara rasional dan komitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut membuat kita memahami Administrasi lebih dalam dan bahwasannya Administrasi bukan hanya tindakan tulis-menulis, surat-menyurat, catat-mencatat dan sebagainya.

Konsep Organisasi

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani "*organon*" yang berarti alat. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali; dalam memanfaatkan sumber daya; [sarana dan prasarana](#), data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Manusia sangat dibutuhkan dalam organisasi, karena manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang sangat penting. Tanpa adanya manusia dalam sebuah organisasi maka organisasi tersebut tidak akan dapat bergerak dan tidak akan dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Menurut Winardi (2009:15) organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan. Dari beberapa pendapat ahli diatas organisasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau himpunan interaksi setiap manusia yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama terkait dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam irawan 2017:38) organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Menurut Siagian (2016:6) mendefinisikan bahwa organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja sama secara format terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan:

Menurut dari beberap pendapat para ahli diatas, Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kelompok kesatuan sosial antar dua orang atau lebih yang bekerja sama mempunyai struktur organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Konsep Manajemen

Menurut Johan (2009:16) Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal, baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Kemudian menurut Terry (2012:36) Manajemen adalah usaha-usaha

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

Robbins dan Coulter (dalam Taufiqurokhman dan Satispi, 2018:7) menyebutkan manajemen adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Menurut Waldo (dalam Zulkifli dan Moris Adidi Yogya, 2014:2) manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Menurut Fayol (dalam Taufiqurokhman dan Satispi, 2018:13-14) manajemen adalah sebuah kegiatan umum dari semua usaha manusia dalam bisnis, pemerintahan, dan rumah tangga.

Henry Fayol (dalam Taufiqurokhman dan Satispi, 2018:8) menyebutkan lima fungsi manajemen yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga, yaitu:

1. Perencanaan (*planning*) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer evaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan.
2. Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.
3. Pengarahan (*directing*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah usaha untuk mengatur dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan efektif dan efisien, untuk memudahkan terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen merupakan proses penyelenggaraan berbagai kegiatan melalui proses merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III Implementasi kebijakan merupakan tahapan pengambilan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan konsekuensi kebijakan tersebut bagi orang-orang yang terkena dampaknya (dalam H. Tachjan, 2006 : 25). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Implementasi menurut Menurut Edwards III yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Terdapat tiga yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut :

- a. Transmisi, menyalur komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu Implementasi yang baik.
 - b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas tidak membingungkan.
 - c. Konsisten, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan jelas.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi adalah staf
 - b. Informasi
 - c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
 - d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- a. Pengangkat birokrat, para pelaksana akan memimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
 - b. Insentif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah :
- a. Standard Operating Procedure (SOP) melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap hari sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - b. Fragmentasi, upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (dalam Wawang, 2010: 28) Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2003:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Menurut beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan proses penyelenggaraan berbagai kegiatan melalui proses merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Konsep Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya. kecuali tembakau dan alkohol.

Konsep Narkoba

Menurut Jackobus (2005), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak lepas dari pengaruhnya.

Narkotika adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya, Istilah lainnya adalah Napza. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Psikotropika zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Sedangkan bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Mengonsumsi narkoba seakan-akan masalah, beban hidup hilang seketika, bahkan membuat jadi semangat namun ketergantungan. Narkoba itu sendiri juga membuat penggunaannya berhalusinasi dan berbagai ilusi dan bisa menambah percaya diri bagi penggunaannya. Narkoba bisa menyebabkan ketergantungan bagi siapapun penggunaannya. Narkoba itu sendiri memang bisa berasal dari tanaman dan juga non tanaman. Bagi pemakainya biasanya akan menimbulkan gejala-gejala negatif setelah menggunakan narkoba

Konsep Pencegahan

Pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *praevenire*, yang artinya datang sebelum atau antisipasi, atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, prevensi diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005 : 145).

Konsep pencegahan adalah suatu bentuk upaya sosial untuk promosi, melindungi, dan mempertahankan kesehatan pada suatu populasi tertentu (National Public Health Partnership, 2006). Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan (Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2006:139).

Jadi disimpulkan pencegahan adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah pencegahan, haruslah didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis dari epidemiologi, agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Metode

Pendekatan Penelitian ini adalah Pendekatan Penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menganalisis dan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan faktanya, serta menjelaskan tentang variable yang diteliti, dalam hal ini adalah "Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru".

Alasan penulis menggunakan tipe kualitatif karena dapat menghasilkan data dengan akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara tersusun, fakta dan akurat sehingga mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Terdapa tiga yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut :

- a. Transmisi, menyalur komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu Implementasi yang baik.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas tidak membingungkan. Konsisten, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh bapak **Sabar Mauliate Tua, S.I.Kom** (Penyuluhan Narkoba Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru) terkait dengan Komunikasi yaitu sebagai berikut :

“Komunikasi yang dilakukan terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba melakukan edukasi sosialisasi pada masyarakat dan yang berkaitan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba. Melaporkan jika ada yang menggunakan atau pengedar narkoba.” (*Wawancara Selasa 25 Juni 2024*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi di nilai cukup apabila sesuai dengan peraturan hak dan kewajiban dan melakukan koordinasi dengan setiap yang berwenang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Dari sisi komunikasi yang konsistensi terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh bapak **Sabar Mauliate Tua, S.I.Kom** (Penyuluhan Narkoba Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru) terkait dengan Komunikasi Konsistensi yaitu sebagai berikut :

“Komunikasi yang Konsistensi dilakukan secara berkala untuk menghimbau setiap saat bukan hanya pada moment tertentu saja. Dengan cara dan bahasa berbeda dalam penyampaiannya, dilihat dari kewenangan dia apa dibagian apa.” (*Wawancara Selasa 25 Juni 2024*).

Berdasarkan wawancara diatas mengenai Komunikasi Konsistensi dapat diketahui bahwa komunikasi terus dilakukan penghubuan tidak hanya pada moment tertentu saja, dan untuk penyampaian dengan cara yang berbeda dengan dilihat wewangnya, dan jika berkomunikasi dengan masyarakat dengan bahasa penghibuan penyampaia agar dapat permudah dimengertinya. Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru melakukan Komunikasi Sosialisasi P4GN pada pertemuan Forum RT/RW di lingkungan Kelurahan agar tercapainya Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba.

Sumber Daya (Resources)

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Terkait dengan penelitian Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru Oleh badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

“Sumber Daya Utama yang berkaitan dengan pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba masih kurang maksimal karena masih adanya pegawai fungsi pembeberantasan yang mernagkap pekerjaan lainnya”. (Wawancara Selasa 25 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bawah Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada bidangnya masih kurangnya sehingga menyebabkan kurang teralisasinya ditandai dengan pegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tidak sesuai. Dari sisi Sumber Daya fasilitas pendukung sarana dan prasarana dalam Implementasi pencegah dan pemberantasan peredaran narkoba di kota pekanbaru berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Dari faslitas sarana dan prasarana yang dimiliki hanya 2 unit motor dan 2 unit mobil oprasional dan seharusnya minimal disetiap 4 bidang yang ada di Badana Narkotika Nasional Kota Pekanbaru setidaknya memiliki kendaraan transportasi untuk oprasional 4 unit mobil dan 4 unit motor agar mempermudah dalam melaksanakan tugasnya.” (Wawancara Selasa 25 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bawah sarana dan prasarana dalam Implementasi pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba kurang terlaksana dengan maksimal sehingga menjadi hambtan bagi para pelaksana dilapangan.

Dari hasil analisis terhadap Sumber Daya dalam Implementasi pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru bahwa belum maksimalnya secara sempurna dikarenakan dalam pelaksanaannya memiliki kendala yang salah satunya kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas sarana dan prasarana untuk melakukan Implemntasi tersebut. Suatu pelaksanaan yang bertujuan dalam mengelola manusia (karyawan) agar memiliki kinerja usaha yang maksimal termasuk pada kebbijakan pengembangan serta proses unuk mendukung strategi. Perlunya mengelola pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas demi terwujudnya tujuan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di kota Pekanbaru.

Tabel V.3: Daftar Susunan Pegawai Badan Narkotika Nasional Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sub Bagian Umum	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	SMA	D3	S1	S2	
ASN	-	2	4	-	6
POLRI	-	-	2	-	2
PPNP	4	1	5	-	10
Total					18

Rehabilitasi	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	SMA	D3	S1	S2	
ASN	-	-	1	2	3
POLRI	-	-	-	-	0
PPNPN	1	1	3	-	5
Total					8

P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat)	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	SMA	D3	S1	S2	
ASN	-	-	2	-	2
POLRI	1	-	-	-	1
PPNPN	-	-	3	-	3
Total					6

Pemberantassn	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	SMA	D3	S1	S2	
ASN	-	-	-	-	0
POLRI	3	-	3	1	7
PPNPN	-	-	-	-	0
Total					7

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2024

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwasannya di Bidang Sub Bagian Umum berjumlah 18 orang. Di golongan ASN sebnyak 6 orang dengan tingkat pendidikan D3 2 orang, S1 4 orang. POLRI sebanyak 2 orang dengan tingkat pendidikan S1 2 orang. Dan PPNPN sebanyak 10 dengan tingkat pendidikan SMA 4 orang, D3 1 orang, S1 5 orang.

Di bidang Rehabilitas dengan golongan ASN sebanyak 3 orang dengan tingkat pendidikan S1 1 Orang,S2 2 orang. PPNPN sebanyak 5 orag dengan tingkat pendidikan SM1 1 orang, D3 1 orang dan S1 3 orang. Dengan keseluruhan total personil 8 orang. Di bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Mayarakat) dengan golongan ASN 2 orang, dengan tingkat pendidikan S1 2 orang. POLRI 1 orang dengan tingkat pendidikan SMA 1 orang. Dan PPNPN 3 orang dengan tingkat pendidikan S1 3 orang.

Di bidang Pemberantasan di Golongan ASN tidak ada, POLRI sebanyak 7 orang dengan tingkat pendidikan SMA 3 orang, S1 1 orang, dan S2 1 orang. Dan PPNP tidak ada. Dengan total personil Badan Narkotika Nasional Kota (BBNK) Pekanbaru sebnyak 39 pesonil, sedangkan maksimal untuk melaksanakan SOP agar semakin terealisasi diperlukan sekitar 78 orang.

Fasilitas dalam mendukung sarana dan prasarana dalam Implemntasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba perlu sarana transportasi yang cukup agar lebih

mempermudah suatu pekerjaan. Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru hanya mempunyai transportasi berupa sepeda motor 2 dan Kendaraan Roda empat atau mobil 2 dengan jumlah transportasi sebanyak 4. Sedangkan maksimal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan di setiap Bidang membutuhkan 4 alat transportasi dengan jumlah keseluruhan total 16 alat transportasi.

Disposisi (Disposition)

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Terkait dengan penelitian Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

“Jika pegawai dalam Implementasi yang berkaitan memiliki disposisi yang baik maka Implementasi dapat berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dan pembagian kerja dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga diperlukan Implementasi yang baik. Jika anggaran untuk menunjang Implementasi digunakan untuk yang lebih dibutuhkan sekali, dan kalau dipikir anggaran itu tidak ada yang cukup kalau kita tidak bisa menggunakan yang lebih utama terlebih dahulu, karena harus sesuai dengan anggaran yang ada saja. (Wawancara Selasa 25 Juni 2024).

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa disposisi yang baik dapat berjalan dengan seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan merupakan pencapaian Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Dengan anggaran yang disesuaikan untuk kebutuhan diperlukan Implementasi yang baik dalam pembagian kerja dalam pencegahan dan pemberantasan .

Dari hasil analisis terhadap Disposisi dalam Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru bahwa pembagian kerja dalam pencegahan dan pemberantasan kota Pekanbaru disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga diperlukan Implementasi yang baik. Jika Disposisi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru berjalan dengan baik maka akan memperlancar jalannya Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Kota Pekanbaru.

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Ketika struktur birokrasi tersebut tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi yang diputuskan secara politik dengan jalan koordinasi dengan baik.

Terkait dengan penelitian Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

“Standar Oprasional dan tanggung jawab diterapkan secara umum sesuai tugas dan fungsi, tetapi masih belum maksimal dikarenakan upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu pekerjaan pegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan mereka yang merangkap untuk beberapa tugas atau pekerjaan.” (*Wawancara Selasa 25 Juni 2024*).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa standar oprasional hanya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Nakrotika Nasional yang ada. Selain itu upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dilakukan Badan Narkotika Nasional dan kewenangan terkait bidangnya.masing-masing.

Dari hasil analisis terhadap Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru bahwa strandar operasi hanya di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional yang ada dan disesuaikan dengan masing-masing bidang yang ada. Selain itu dari sisi upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau akifitas-aktifitas masih rendah. Jika struktur Organisasi pada Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru berjalan dengan lancar maka akan meningkatkan penceghan dan pemberantasan peredaran narkoba di kota pekanbaru.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pekanabru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru diketahui bahwa jika Implemntasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan sumber daya masih terbatas dalam Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan, dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegitan pencegahan dan pemberantasan sehingga menjadi hambatan pelaksanaan di lapangan, serta belum maksimalnya Standar Operasional dan tanggung jawab dikarenakan upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu pekerjaan pegawai yang merangkap untuk beberapa tugas atau pekerjaan, dan belum maksimalnya pembagian kerja dalam Pencegahan dan Pemebrantasan Narkoba di Kota Pekanbaru disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Iriawan Maksudi, Beddy. 2017, *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok, PT RajaGrafindo Persada.
- Kencana Syafiie, Inu. 2018, *Sistem Administrasi Publik*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Tachjan. 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

- Hanim, Sufian. 2005, *Administrasi Organisasi Dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.
- Pasolong, Harbani. 2010, *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Hartatik, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Askara.
- Hasiabuan, Melayu S.P. 2011. *Manajemen; Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta, Bumi Askra.
- Stoner, A.F, James, 2008. *Manajemen*. Jakarta, Inter Media.
- Siagian, P. Sndang. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Askara.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.
- Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Rosdakarya.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa

Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.

- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib

Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman
Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.

- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan

Permasyarakatan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.

- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA:*

Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 89-101.

- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.

- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.

- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Dedi Arianto, 2021. *Analisis Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (Bnnpr)*, Skripsi.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sheila Nindia Arif NST, 2019. *Analisis Kinerja seksi pemberantasan badan narkotika nasional kota pekanbaru dalam pemberantasan narkoba di kalangan pelajar dn mahasiswa dikota pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Riau.

Arnela Nurmalita, 2020. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya*. Publika. Volume 10 Nomor 4, Tahun 2022, 1111-1122. Universitas Negeri Surabaya.

Tri Wulandari, 2016. *Impelementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNN DIY*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 5 Vol. V Tahun 2016 . Universitas Negeri Yogyakarta.

Misbahudin Djaba dan Ellys Rachman, 2019. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo*. Volume VI Nomor 2 Desember 2019. STIA Bina Taruna Gorontalo.

Lely Hernayanty Munthe, 2018. *Analisis Pelaksanaan Admmministrasi Pemerintahan Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi. Skripsi. Universitas Islam Riau.

Regulasi:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Instruksi Presiden Rebulik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.